

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman tertinggi di dunia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, sekitar 700 bahasa daerah, serta enam agama yang diakui secara resmi oleh negara (BPS, 2020). Keberagaman tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi kehidupan berbangsa, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam menjaga kohesi sosial dan membangun relasi yang harmonis antar kelompok. Dalam masyarakat yang majemuk, toleransi sosial menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial, mendorong integrasi masyarakat, serta meminimalkan potensi konflik yang muncul akibat perbedaan identitas sosial, budaya, maupun agama.

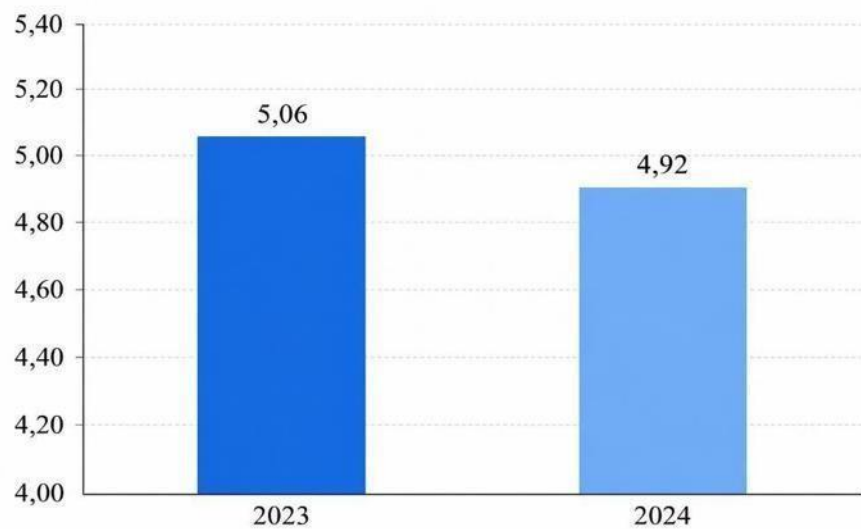
Tantangan tersebut semakin relevan dalam konteks wilayah metropolitan. Masyarakat metropolitan ditandai oleh struktur sosial yang kompleks, keberagaman kelompok sosial yang tinggi, serta adanya perbedaan status sosial dan ekonomi yang semakin beragam. Kawasan Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 35 juta jiwa (BPS, 2023). Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan migrasi nasional, Jabodetabek menjadi ruang yang mempertemukan berbagai kelompok sosial dengan latar belakang etnis, agama, budaya, maupun kelas sosial yang beragam. Keberagaman tersebut membentuk struktur sosial yang heterogen dan berlapis, sehingga menciptakan peluang terbentuknya integrasi sosial yang kuat. Namun, di sisi lain, perbedaan posisi sosial, akses terhadap sumber daya, dan kepentingan antarkelompok juga berpotensi menimbulkan ketegangan maupun gesekan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Proses urbanisasi yang berlangsung pesat di Jabodetabek tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik wilayah, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial. Mobilitas antarkota yang tinggi

membentuk pola kehidupan metropolitan yang berbeda dengan masyarakat lokal pada umumnya. Interaksi sosial menjadi lebih luas, namun pada saat yang sama ikatan komunitas lokal cenderung melemah sehingga kohesi sosial menjadi lebih rentan (Jariego & Holgado, 2015). Selain itu, pertumbuhan wilayah metropolitan yang tidak selalu diikuti dengan pemerataan pembangunan menyebabkan munculnya ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan layanan publik (Kurniawan, 2025).

Ketimpangan sosial tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas relasi antarkelompok dalam masyarakat. Perbedaan akses terhadap sumber daya dapat memunculkan persepsi ketidakadilan sosial yang pada akhirnya memengaruhi cara individu memandang kelompok lain. Dalam konteks metropolitan, ketimpangan sering kali diperkuat oleh fragmentasi ruang perkotaan dan segregasi permukiman. Perluasan kawasan perkotaan mendorong berkembangnya kawasan hunian eksklusif bagi kelompok ekonomi tertentu, sementara kelompok berpenghasilan rendah terdorong untuk tinggal di wilayah yang memiliki akses infrastruktur dan layanan publik yang lebih terbatas (Adugbila et al., 2023). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi frekuensi interaksi antarkelompok dan memperlebar jarak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai pembangunan metropolitan di Pulau Jawa juga menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah (Pravitasari et al., 2020).

Di tengah kondisi tersebut, keberagaman yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya toleransi sosial. Berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik intoleransi masih ditemukan di wilayah perkotaan Indonesia, termasuk di kawasan Jabodetabek. Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) yang diterbitkan oleh SETARA *Institute*, rata-rata skor toleransi kota di Indonesia mengalami penurunan dari 5,06 pada tahun 2023 menjadi 4,92 pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, Bekasi menempati peringkat ketujuh kota paling toleran dengan skor 5,93, sementara Jakarta tidak masuk dalam sepuluh besar kota dengan tingkat toleransi tertinggi (SETARA *Institute*, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya keberagaman sosial di wilayah perkotaan belum tentu diikuti oleh meningkatnya toleransi antarkelompok.



**Gambar 1. 1. Perbandingan Rata-Rata Indeks Kota Toleran Indonesia**

Fenomena intoleransi di Jabodetabek tidak hanya muncul dalam bentuk konflik terbuka atau kekerasan fisik, tetapi juga dalam bentuk yang lebih halus dan sistemik. Berbagai bentuk segregasi permukiman berdasarkan identitas sosial, penolakan terhadap kelompok minoritas, diskriminasi dalam akses pekerjaan, hingga penyebaran ujaran kebencian di ruang digital masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat perkotaan (Mietzner & Muhtadi, 2018). Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation (2020) menunjukkan bahwa sekitar 59% responden yang tinggal di wilayah perkotaan mengaku pernah menyaksikan atau mengalami tindakan intoleransi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bentuk intoleransi yang dilaporkan meliputi berbagai praktik diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama maupun etnis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan intoleran terhadap kelompok tertentu dalam kehidupan sosial.

Rendahnya toleransi sosial dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi kehidupan masyarakat metropolitan. Secara sosial, intoleransi berpotensi memperlebar jarak sosial antarkelompok, memperkuat stereotip dan prasangka, serta meningkatkan risiko munculnya konflik horizontal. Secara psikologis, intoleransi dapat memunculkan kecenderungan diskriminasi terhadap kelompok lain, penolakan terhadap keberagaman, serta pembatasan hak-hak kelompok tertentu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-



faktor yang memengaruhi toleransi sosial menjadi penting sebagai dasar dalam mengembangkan strategi untuk memperkuat kohesi sosial di wilayah metropolitan.

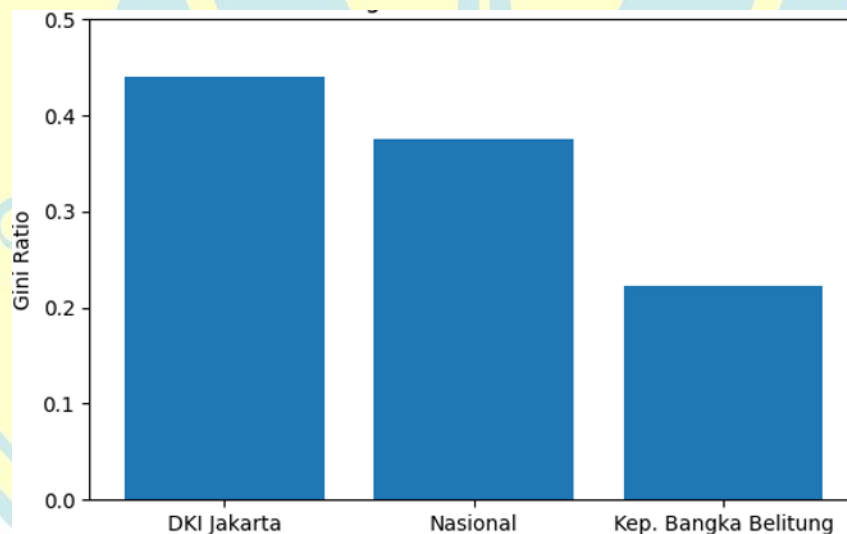
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa toleransi sosial dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor tersebut meliputi karakteristik kepribadian, seperti empati, *agreeableness*, dan *openness to experience*, yang berkaitan dengan kecenderungan individu untuk menerima keberagaman (Butrus & Witenberg, 2013; Ng et al.,

2021). Selain itu, status sosial dan nilai yang dianut individu juga berkontribusi terhadap pembentukan toleransi. Individu yang memiliki orientasi nilai yang lebih inklusif dan egalitarian cenderung menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan individu yang lebih berorientasi pada persaingan dan hierarki sosial (Artemov & Pinkevich, 2020). Temuan tersebut menunjukkan bahwa toleransi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial, tetapi juga oleh faktor psikologis yang membentuk cara individu memandang hubungan antarkelompok.

Salah satu faktor psikologis yang dipandang relevan dalam menjelaskan toleransi sosial adalah *Social Dominance Orientation* (SDO). Berbeda dengan faktor-faktor lain yang lebih menekankan pada karakteristik kepribadian atau nilai sosial secara umum, SDO secara khusus menjelaskan kecenderungan individu dalam mendukung atau menolak hierarki sosial antarkelompok. Menurut Pratto et al. (1994), SDO merupakan kecenderungan individu untuk mendukung atau menolak keberadaan hierarki sosial antarkelompok dalam masyarakat. Individu dengan tingkat SDO yang tinggi cenderung memandang ketimpangan sosial sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diinginkan, sehingga lebih mendukung dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Sebaliknya, individu dengan tingkat SDO yang rendah cenderung lebih mendukung kesetaraan sosial dan menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap kelompok yang berbeda. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dinamika tersebut adalah melalui konsep *Social Dominance Orientation* (SDO). Menurut Pratto et al. (1994), SDO merupakan kecenderungan individu untuk mendukung atau menolak keberadaan hierarki sosial antarkelompok dalam masyarakat. Individu dengan tingkat SDO yang tinggi cenderung memandang ketimpangan sosial sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diinginkan, sehingga lebih mendukung dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Sebaliknya, individu dengan tingkat SDO

yang rendah cenderung lebih mendukung kesetaraan sosial dan menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap kelompok yang berbeda.

Dalam konteks masyarakat metropolitan seperti Jabodetabek, orientasi dominasi sosial menjadi penting untuk dikaji karena wilayah ini ditandai oleh tingginya persaingan dalam memperoleh sumber daya, kesenjangan sosial-ekonomi, serta interaksi yang intens antar kelompok sosial. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi tersebut adalah koefisien Gini DKI Jakarta yang mencapai 0,441 pada tahun 2022, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif tinggi (BPS, 2022). Angka tersebut berada di atas rasio Gini nasional yang tercatat sebesar 0,375, sehingga menempatkan DKI Jakarta sebagai salah satu dari tujuh provinsi dengan tingkat ketimpangan melebihi rata-rata nasional. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat (Rahmad, 2025).



**Gambar 1. 2. Perbandingan Gini Ratio (Maret 2025)**

Ketimpangan ini sering kali berkorelasi dengan perbedaan akses terhadap ruang publik, transportasi, serta peluang ekonomi. Studi mengenai keberlanjutan metropolitan di Pulau Jawa juga menunjukkan bahwa kinerja pembangunan yang tidak merata antarwilayah dapat memperlebar jarak sosial dan ekonomi (Pravitasari et al., 2020). Pendekatan multi-kriteria terhadap dinamika transformasi metropolitan juga menyoroti bahwa fragmentasi ruang perkotaan berpotensi

memperkuat perbedaan sosial jika tidak disertai pengelolaan yang inklusif (Salvati et al., 2017). Ketimpangan tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa struktur hierarki sosial merupakan sesuatu yang normal dan tidak terhindarkan. Selain itu, kompetisi dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan berbagai sumber daya lainnya dapat mendorong munculnya pandangan bahwa keberhasilan suatu kelompok terjadi atas pengorbanan kelompok lain.

Relevansi SDO juga semakin kuat ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika politik identitas di Jabodetabek. Tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di wilayah perkotaan memungkinkan masyarakat terpapar berbagai narasi yang menekankan perbedaan antara kelompok "kami" dan "mereka" (APJII, 2023). Selain itu, berbagai peristiwa politik dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa identitas sosial berbasis agama, etnis, maupun kelompok politik dapat dengan mudah dimobilisasi dan memengaruhi hubungan antarkelompok (Mietzner & Muhtadi, 2018). Dalam perspektif *Social Dominance Theory*, kondisi tersebut dapat memperkuat kecenderungan individu untuk mempertahankan atau membenarkan struktur ketimpangan sosial yang ada.

Meskipun penelitian mengenai SDO telah berkembang cukup luas di berbagai negara, kajian yang secara khusus menelaah peran orientasi dominasi sosial terhadap toleransi sosial pada masyarakat metropolitan Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian toleransi di Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis dan politik pada level makro, sementara kajian yang menempatkan faktor psikologis individual sebagai penjelas perilaku toleransi masih belum banyak dilakukan. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana orientasi individu terhadap hierarki sosial memengaruhi sikap toleransi dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan intervensi sosial yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran orientasi dominasi sosial terhadap toleransi sosial pada masyarakat metropolitan di Jabodetabek. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian psikologi sosial mengenai hubungan antara orientasi dominasi sosial dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat metropolitan Indonesia. Selain memberikan



kontribusi teoretis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih inklusif, adil, dan toleran sehingga mampu memperkuat kohesi sosial di kawasan metropolitan Jabodetabek.

## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Struktur sosial masyarakat Jabodetabek yang kompleks dan heterogen tidak terlepas dari adanya ketimpangan sosial serta fragmentasi spasial yang berpotensi memengaruhi kualitas hubungan antarkelompok dalam kehidupan sehari-hari.
2. Keberagaman sosial di wilayah metropolitan tidak secara otomatis menghasilkan toleransi, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan skor Indeks Kota Toleran berdasarkan laporan SETARA Institute (2024).
3. Struktur dominasi sosial yang tercermin dalam ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan ruang publik berpotensi membentuk persepsi ketidakadilan serta memperkuat hierarki antarkelompok.
4. Praktik intoleransi, polarisasi sosial, dan eksklusivitas komunitas di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa toleransi sosial belum terbentuk secara merata di seluruh wilayah metropolitan.
5. Secara teoretis, orientasi dominasi sosial (*Social Dominance Orientation/SDO*) dipandang sebagai prediktor sikap antarkelompok, namun hubungan empiris antara SDO dan toleransi sosial dalam konteks metropolitan Indonesia, khususnya Jabodetabek, masih terbatas dan belum banyak diuji.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengujian peran orientasi dominasi sosial (*Social Dominance Orientation/SDO*) terhadap toleransi sosial pada masyarakat metropolitan di wilayah Jabodetabek. Fokus kajian diarahkan pada aspek psikologis individu dalam memandang hierarki dan ketimpangan antarkelompok, serta keterkaitannya dengan sikap toleransi dalam interaksi sosial lintas kelompok.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah orientasi dominasi sosial memiliki peran terhadap toleransi sosial pada masyarakat metropolitan di wilayah Jabodetabek.

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh orientasi dominasi sosial terhadap tingkat toleransi sosial pada masyarakat metropolitan di wilayah Jabodetabek.

#### 1.6. Manfaat Penelitian

##### 1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian psikologi sosial, khususnya terkait hubungan antara Orientasi Dominasi Sosial dan toleransi sosial.
2. Memperluas penerapan *Social Dominance Theory* yang dikembangkan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto dalam konteks masyarakat metropolitan Indonesia.
3. Menambah referensi empiris mengenai faktor psikologis yang berperan dalam pembentukan sikap toleransi sosial di wilayah urban.

##### 1.6.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah metropolitan seperti Jabodetabek mengenai faktor psikologis yang memengaruhi toleransi sosial.
2. Menjadi dasar dalam perancangan program intervensi sosial atau pendidikan yang bertujuan memperkuat sikap egalitarian dan mengurangi dampak negatif ketimpangan sosial.
3. Memberikan wawasan bagi masyarakat luas tentang pentingnya memahami orientasi terhadap hierarki sosial dalam membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.